

## **BAB II**

### **HUBUNGAN BAIK ARAB SAUDI DAN IRAN**

Semenjak berdirinya kerajaan Arab Saudi, hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran mengalami situasi yang pasang surut. Namun pada bab ini akan dibahas hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran dalam bidang diplomatik, ekonomi dan militer. Bab ini berupaya menunjukkan bahwa sebenarnya Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan cukup baik sebelum terjadinya eskalasi konflik yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik di tahun 2016.

#### **A. Politik Luar Negeri Arab Saudi**

Politik luar negeri Arab Saudi dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan fakta geografi, sejarah, agama, ekonomi, keamanan dan politik. Prinsip ini digunakan untuk membentuk *framwaork* dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi seperti *good-neighbor policy*, kebijakan non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, dan penguatan hubungan dengan negara teluk, negara arab serta negara islam. Kebijakan luar negeri Arab Saudi berjalan melalui beberapa lingkaran seperti, Lingkaran negara Teluk, Arab, Islam dan lingkaran Internasional (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Lingkaran pertama kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah negara-negara yang berada di wilayah teluk yaitu, Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar dan Uni Emitrat Arab. Semenjak didirikannya kerajaan

Arab Saudi oleh Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud daerah teluk merupakan lingkaran paling penting dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi dikarenakan pertimbangan hubungan darah, sejarah hubungan kedua negara, dan lingkungan geografis yang unik serta kesamaan sistem politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Arab Saudi memprioritaskan hubungannya dengan negara-negara Teluk Arab karena kondisi wilayah ini akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas dalam negeri Arab Saudi (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Kebijakan luar negeri Arab Saudi di lingkaran negara teluk berdasarkan prinsip-prinsip utama yaitu, 1) Keamanan dan stabilitas kawasan adalah tanggung jawab negara-negara di wilayah ini, 2) Negara-negara Teluk memiliki hak untuk mempertahankan keamanan mereka dan mempertahankan kemerdekaan mereka sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri dan sebagaimana dijamin oleh hukum internasional untuk menghadapi setiap tantangan internal maupun internasional, 3) Menolak campur tangan dalam urusan internal negara-negara ini, dan bekerja sama melawan setiap agresi pada salah satu anggota negara, sehubungan dengan agresi apapun, pada saat yang sama negara-negara anggota pertimbangkan agresi pada satu negara sebagai agresi pada semua anggota negara, 4) Memperkuat kerjasama antara Inggris dan negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* di berbagai politik, ekonomi, keamanan, sosial, bidang budaya dan lain-lain, melalui pendalaman hubungan antara negara-negara anggota, 5) Mengambil tindakan serius

dan gigih untuk menyelesaikan semua sengketa (terutama sengketa perbatasan) antara negara-negara kawasan melalui pemahaman yang didasarkan pada persaudaraan dan *good-neighbourhood policy* (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Lingkaran kedua dari kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah Lingkaran Arab. Arab Saudi menyadari pentingnya mengembangkan dan mengkoordinasikan hubungan antara negara arab untuk menjaga kepentingan negara arab secara keseluruhan. Salah satu bentuk dari kebijakan ini adalah pendirian Liga Arab pada tahun 1945. Kebijakan Arab Saudi dalam lingkaran arab didasarkan pada prinsip persaudaraan dan solidaritas yang menawarkan semua jenis dukungan dan bantuan (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Lingkaran ketiga kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah Lingkaran Dunia Islam. Islam selalu menjadi faktor penting dalam penentuan prioritas kebijakan luar negeri Arab Saudi. Kebijakan luar negeri Arab Saudi kepada negara-negara islam ditujukan untuk menyatukan negara islam sehingga terbentuknya ikatan solidaritas yang kuat anatar negara-negara islam di dunia. Kebijakn ini tercermin dalam pembentukan Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1969 yang kemudian aka berubah menjadi Organisasi Kerjasam Islam (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Lingkaran Internasional merupakan lingkaran terakhir pada kebijakan luar negeri Arab Saudi. Dalam Lingkaran Internasional, Arab Saudi sangat tertarik untuk membangun hubungan yang setara dengan negara-negara kuat yang karena kepentingan-kepentingan yang dimiliki Arab Saudi. Kepentingan ini muncul akibat peran penting Arab Saudi dalam Dunia Arab dan Islam. Dimana Arab Saudi berusaha untuk melebarkan kebijakannya mencapai level masyarakat internasional. Kebijakan ini tercermin dengan ikut sertanya Arab Saudi sebagai negara anggota pendiri Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Arab Saudi percaya bahwa keamanan internasional merupakan bagian dari kebijakan luar negerinya (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia 2016).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Iran merupakan negara yang diprioritaskan oleh Arab Saudi untuk menjalin kerjasama. Selain termasuk dalam lingkaran kedua dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi, Iran juga merupakan negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara teluk yang menjadi lingkaran pertama kebijakan luar negeri Arab Saudi. Iran juga merupakan negara yang berpengaruh di Timur Tengah diantara negara lain yang berada di Timur Tengah. Iran memiliki pengaruh yang besar terhadap empat negara Arab yaitu Syria, Iraq, Lebanon dan Yemen (Sadjadpour dan Taleblu 2015).

## **B. Hubungan Diplomatik Arab Saudi dengan Iran**

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran telah dimulai pada awal dibentuknya dinasti Al-Saud pada tahun 1928 (Heydarian 2010). Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1929 Arab Saudi dan Iran menandatangani *Saudi-Iranian Friendship Treaty* (Rizwan, et al. 2014, 93). Pada intinya, perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk membangun hubungan politik, diplomatik dan hubungan komersial diantara kedua negara (Altoraifi 2012, 97). Namun perjanjian ini tidak membawa dampak yang besar bagi hubungan kedua negara, dikarenakan masing-masing negara disibukkan dengan pemabangunan dalam negerinya.

Keduataan besar Arab Saudi untuk Iran berada Kashanak, Tehran. Sedangkan Konsulat Arab Saudi untuk Iran berada di Sajjad Shahr, Mashhad. Kedutaan Iran untuk Arab Saudi berada di dua kota yaitu Riyadh dan Jeddah. Kedutaan Iran untuk Arab Saudi di Riyadh berdiri pada tahun 1930 sedangkan yang di Jeddah pada tahun 1975. (Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of IRAN)

Kunjungan formal antara kepala negara baru dilakukan pada tahun 1955. Raja Saud mengunjungi Iran untuk memperkuat hubungan kedua negara. Kunjungan ini kemudian dibalas oleh Shah Pahlevi yang berkunjung ke Arab Saudi pada bulan Maret tahun 1957 untuk membicarakan hubungan diplomatik lebih lanjut kedua negara (Keynoush 2016, 69-71). Kunjungan Raja Faisal ke Iran pada tahun 1966

memperkuat hubungan Arab Saudi dan Iran. Diikuti dengan penandatanganan perjanjian demokrasi diantara kedua negara pada tahun 1968 (Rizwan, et al. 2014, 95).

Invasi Iraq ke Kuwait yang terjadi pada bulan Agustus 1990 membantu perbaikan hubungan Arab Saudi dan Iran. Hubungan diplomatik kedua negara memasuki fase baru, dimana ketegangan kedua negara semakin berkurang. Teutama setelah tuduhan terhadap Iran yang dengan sengaja menyebarkan pergerakan revolusi di Timur Tengah (Alghunaim 2014).

Pada era pemerintahan President Rafsanjani dan Presiden Khatami merupakan era terbaik dalam hubungan Arab Saudi dan Iran berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan. Pada bulan Maret tahun 1991, Presiden Rafsanjani menemui Raja Fahd di Riyadh membahas hubungan bilateral kedua negara dan perjanjian tentang Haji. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi yaitu Saud al-Faysal ke Tehran Pada bulan April 1991. Pertemuan ini merupakan pertemuan bersejarah, karena merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi Arab Saudi ke Iran semenjak Revolusi Iran (Suwaidi 1996).

Pangeran Abdullah sempat menggantikan raja Fahd pada tahun 1995-1996. Kehadirannya merupakan salah satu faktor terjalannya hubungan baik Arab Saudi dan Iran pada tahun ini. Pangeran Abdullah mengerti bahwa hubungan dengan Iran tidak bisa dilihat dengan

menggunakan cara pandang pemerintah tahun 1980an. Maka dari itu, dibutuhkan perubahan dalam menjalin hubungan dengan Arab Saudi (Amiri dan Ku Samsu 2011). Hal ini dibuktikan Arab Saudi dengan tidak menyalahkan Iran sebagai penyebab peristiwa ledakan bom di Menara Khobar pada tanggal 25 Juni 1996 yang menewaskan 19 personel militer Amerika serta melukai 200 orang lainnya. Walaupun Amerika Serikat bersikeras menuduh Iran sebagai dalang dari tragedi ini (Rizwan, et al. 2014). Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Naeem Al-sadoug menyatakan : *“Saudi Arabia does not accuse anybody, and also it does not intend somebody benefiting from the event for its own retaliate”* (Ettelaat 1996). Dalam pernyataan ini dapat dilihat bahwa Saudi Arabia tidak menuduh pihak manapun termasuk Iran terhadap tragedi ini. Sehingga, hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik.

Hubungan baik kedua negara dapat juga dilihat ketika gempa mengguncang kota Bam di Iran pada tanggal 26 Desember 2003. Arab Saudi merupakan negara pertama yang merespon terhadap bencana tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Saud al-Faisal menghubungi duta besar Arab Saudi di Iran Naser Al Barik untuk memberikan segala macam pertolongan bagi korban gempa. Arab Saudi juga mengirimkan dua pesawat yang berisi peralatan medis, obat-obatan serta 12 orang tenaga kesehatan (Keynoush 2016, 158).

Dengan bergantinya kepemimpinan di kedua negara tidak membuat hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran menjadi buruk.

Hubungan baik diantara kedua negara terus berjalan. Kerjasama tidak hanya terjalin dalam bidang diplomatik saja, namun juga merambat kepada kerjasama ekonomi dan militer.

### **C. Kerjasama Ekonomi Arab Saudi dengan Iran**

Hubungan diplomatik kedua negara yang berjalan dengan baik, membuat kedua negara melanjutkan kerjasama di bidang ekonomi. Pangeran Abdullah, yang sedang menggantikan Raja Fahd dalam Pertemuan Puncak Organisasi Kerjasama Islam di Dakar pada bulan Desember 1991, bertemu dengan Presiden Rafsanjani. Kemudian mengundang Presiden Rafsanjani berkunjung ke Arab Saudi. Dalam pertemuan ini, Presiden Rafsanjani mengutarakan permintaan personal kepada Raja Fahd untuk bersama memperluas kerjasama mereka dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Supaya OPEC memberikan sanksi kepada Iraq berupa pemotongan jumlah produksi minyak. Demi meningkatkan harga minyak di pasar minyak mentah dunia. Sehingga Iran mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang setelah perang teluk (Keynoush 2016, 131-133).

Permintaan itu diterima oleh raja Fahd dan berdampak pada naiknya harga minyak pada bulan Mei 1992. Iran berhasil mempertahankan produksi minyak yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Pada tahun 1992, Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Velayati dan Kepala badan Intelejen, Peradilan, Militer dan



Angkatan laut Iran berkunjung ke Arab Sudi untuk membahas kesempatan kerjasama ekonomi diantara kedua negara. Setelah beberapa kali pertemuan di Jeddah, Riyadh, Provinsi Timur, dan Tehran, Raja Fahd mengajukan pembentukan komisi ekonomi untuk membantu menghilangkan larangan impor Arab Saudi ke Iran tahun 1988. Pada pertemuan ini Raja Fahd juga memerintahkan untuk menambah kuota Haji Iran menjadi 120.000 orang (Keynoush 2016, 131-133).

Pada bulan Juni 1997, Arab Saudi dan Iran bekerjasama untuk meyakinkan OPEC untuk menurunkan produksi minyak negara-negara OPEC. Pada tahun ini juga, jalur penerbangan Arab Saudi – Iran kembali dibuka. Dikutip dari *Reuters* pada bulan Juli 1997, Menteri Pertahanan Arab Saudi menyatakan : “*ties between Saudi Arabia and Iran will never be severed*” (Cordesman dan Burke 2001).

Selanjutnya pada bulan September tahun 1997, Pertemuan Puncak ke-delapan Organisasi Kerjasama Islam yang dilaksanakan di Tehran mempererat hubungan Arab Saudi dan Iran. Terlaksananya pertemuan ini tidak lepas dari persetujuan Pangeran Abdullah yang menerima pelaksanaan pertemuan ke-delapan walaupun pertemuan ket-ujuh baru saja dilaksanakan pada bulan Maret. Raja Fahd mengutus Menteri Negara ke Tehran untuk menyampaikan pesan bahwa Pangeran Abdullah akan hadir dalam pertemuan OKI ke-delapan dan juga untuk membahas pembentukan *High Joint Annual Committe* antara kedua negara. Hal ini

bertujuan untuk membentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi yang aktif antara kedua negara (Alghunaim 2014). Presiden Khatami menjemput langsung Pangeran Abdullah di Bandara dan menyambutnya dengan ciuman di kedua pipi yang merupakan gestur yang menandakan hubungan baik di antar kedua negara (Amiri dan Ku Samsu 2011).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Iran Broadcasting pada tahun 1999, Menteri Luar Negeri Iran Kharrazi menyatakan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Tehran membuka jalan untuk hubungan yang lebih kuat antar Arab Saudi dan Iran. Semenjak pertemuan ini, terdapat kemajuan dari hubungan kedua negara. Pangeran Abdullah menyadari potensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh Iran. Hubungan Arab Saudi dan Iran bisa menjadi kunci penting untuk perkembangan regional daerah Teluk (Amiri dan Ku Samsu 2011).

Pada bulan Februari tahun 1998, mantan Presiden Rafsanjani mengunjungi Arab Saudi selama 10 hari. Pertama-tama ia melakukan pertemuan dengan para pengusaha Arab Saudi untuk membahas keinginan Iran memperluas kerjasama perdagangan dengan Arab Saudi. Kemudian Rafsanjani bertemu dengan Raja Fahd, Pangeran Abdullah, Pangeran Nayef, Pangeran Sultan dan Pangeran Turki. Rafsanjani menerima salinan dari hasil investigasi tragedi bom di Khobar dan menyarankan agar Arab Saudi dan Iran harus melihat dengan seksama sebenarnya apa akar permasalahan terjadinya peristiwa terorisme

(Keynoush 2016, 144-147). Rafsanjani meminta kepada Arab Saudi agar menerima tenaga kerja dari Iran, mengingat Arab Saudi kekurangan tenaga kerja ahli. Pada pertemuan ini Rafsanjani menerima proposal kerjasama untuk memperluas ekonomi, komersil, teknis, keuangan, bidang keilmuan serta hubungan budaya kedua negara. Kemudian kunjungannya ke Arab Saudi diakhiri dengan ibadah Haji (Keynoush 2016, 144-147).

Pada bulan Maret tahun 1998 di Riyadh, Menteri Luar Negeri Iran Kamal Kharrazi dan Menteri Pertahanan Iran Shamkhani menandatangani Protokol kerjasama selama lima tahun, tentang perluasan kerjasama yang akan dilaksanakan secepatnya dalam bidang budaya, pendidikan, komunikasi, komersil, intelejen, dan ikatan keamanan. Pada bulan ini Raja Fahd melalui Kharrazi mengirim undangan untuk Presiden Khatami agar mengunjungi Arab Saudi (Keynoush 2016, 144-147).

Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 1998 kerjasama juga merambat ke bidang ekspor dan impor. Iran mengekspor karpet, *saffron*, makanan dan semen ke Arab Saudi. Iran juga menerima Impor dari Arab Saudi berupa minyak, produk kimia, dan pendingin bensin. Arab Saudi dan Iran juga menandatangani kerja sama dalam jasa penyiaran, transportasi darat dan laut, serta bertukar keahlian dalam bidang lingkungan. Demi menanggulangi krisis kekurangan tenaga kerja dan pengangguran di Arab Saudi dan Iran (Keynoush 2016, 144-147).

Dibulan Mei ini juga, sebuah perjanjian penting dalam sejarah kedua negara ini ditandatangani. *The Cooperation Agreement of 1998* merupakan hasil dari perundingan Arab Saudi dan Iran selama 14 bulan. Perjanjian ini berisi tentang kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan, budaya dan olah raga. Serta dibentuknya komite yang akan bertemu secara berkala untuk mempelajari dan mencari cara agar hubungan antara kedua negara makin terjalin erat (Altoraifi 2012, 210). Perjanjian ini merupakan awal yang baik bagi hubungan kedua negara. Seperti yang dikatakan Presiden Khatami, penandatanganan perjanjian ini bukan lah akhir dari proses, namun awal dari lebih banyaknya perjanjian dan kerjasama di antara kedua negara. Perjanjian ini merupakan simbol berharga yang memperlihatkan penguatan dalam hubungan bilateral kedua negara. Sebelum ditandatangani perjanjian ini, Arab Saudi dan Iran tidak memiliki bentuk dan sumber lembaga hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka dalam masalah perdagangan ataupun politik. Oleh karena itu, perjanjian ini mengandung sumber instrumen legal yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pemerintahan serta komersil melalui hukum perdagangan internasional (Altoraifi 2012, 212).

Hubungan kerjasama Arab Saudi dan Iran berlanjut dengan dilaksanakannya kunjungan dua hari oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal pada bulan April 1999. Kemudian pada bulan selanjutnya Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan

melakukan kunjungan selama lima hari. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Pertahan semenjak revolusi Iran. Pangeran Sultan dan Wakil Presiden Hassan Habibi membicarakan tentang penambahan kerjasama perdagangan dan ikatan kebudayaan serta penandatanganan perjanjian untuk menambah penerbangan diantara kedua negara (Cordesman dan Burke 2001).

Pada bulan Mei 1999, Presiden Khatami melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Pada pertemuan itu, Raja Fahd menyatakan : *"The door is wide open to develop and strengthen relations between the two countries in the interests of the two peoples and the Muslim world"* (BBC News 1999). Raja Fahd berpendapat kunjungan ini merupakan terobosan oleh Presiden Iran karena telah membuka pintu bagi hubungan yang lebih kuat antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal mengungkapkan bahwa pertemuan berjalan dengan sangat baik. Terlihat melalui pernyataannya, *"The main ingredient for establishing solid relations is confidence-building. For that we need to settle outstanding problems peacefully and amicably."* Pernyataan ini juga menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan di antara kedua negara agar menjalin hubungan yang erat (BBC News 1999).

Dalam kunjungannya ini, Presiden Khartami mengunjungi Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah Umrah, serta akan mengunjungi perusahaan minyak Saudi Aramco di Provinsi Timur Arab Saudi (BBC

News 1999). Pertemuan Arab Saudi dan Iran kali ini membahas tentang cara untuk membuat negara-negara penghasil minyak untuk memotong hasil produksi agar terjadinya kenaikan harga minyak. Seperti Iran, Arab Saudi sedang menghadapi turunnya harga minyak selama 18 bulan. Dengan kesepakatan dua negara ini maka pada musim gugur tahun 1999 harga minyak berhasil dinaikkan (Jehlmay 1999).

Pada tahun 1999 Nategh-Nouri Ketua Parlemen Iran beserta 95 anggota delegasi mengunjungi Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Menteri Negara Arab Saudi dan Parlemen Iran. Kunjungan ini dibalas dengan kedatangan *Majilis al-shura* (Majelis Permusyawaratan Arab Saudi) ke Tehran untuk membangun *Islamic inter-parliamentary union*. Delegasi yang berjumlah anggota ini dipimpin oleh Menteri Industri dan Listrik Hashim Abdullah Yamani. Kunjungan dilaksanakan selama dua minggu yang diharapkan akan memicu pertumbuhan bersama dari ekonomi kedua negara (Keynoush 2016, 149).

Sebuah MoU telah disetujui pada bulan Januari tahun 2000 oleh Arab Saudi dan Iran. MoU ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan dan kerjasama investasi, serta mengkoordinasi posisi mereka dalam organisasi internasional dan regional. MoU ini juga membangun kerjasama di bidang Navigasi, pengembangan pelabuhan serta kerjasama konsul (Keynoush 2016, 149).

Hubungan di antara kedua negara sempat sedikit terganggu pada

pertemuan OPEC bukan Maret tahun 2000. Arab Saudi dan Iran berbeda pendapat dalam strategi produksi minyak. Arab Saudi menginginkan adanya peningkatan besar dalam kuota produksi OPEC untuk menstabilkan harga serta untuk mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar. Sedangkan Iran sudah berada pada batas produksi, apabila kenaikan produksi dilakukan maka akan berdampak buruk pada perekonomian Iran. Pada akhirnya, Kebijakan yang diinginkan Arab Saudi yang dijalankan. Namun hal ini tidak menimbulkan pertengkaran di antara kedua negara. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara kedua negara tidak mempengaruhi hubungan baik mereka (Cordesman dan Burke 2001).

Peningkatan kerjasama perdagangan antara kedua negara dapat dilihat pada tahun 2000, dimana ekspor Arab Saudi ke Iran meningkat sebanyak 98%. Jumlah impor Arab Saudi kepada Iran kurang lebih mencapai USD 40 juta per tahun. Iran menduduki peringkat ke 17 dari daftar impor Arab Saudi, dimana sebelumnya hanya menduduki peringkat 31. Volume perdagangan kedua negara meningkat hingga USD 133 juta pada tahun ini dibandingkan pada tahun 1999 hanya USD 95 Juta (Keynoush 2016, 149).

*The Joint Economic Commission* memberikan peran yang signifikan dalam perkembangan kerjasama perdagangan antara Arab Saudi dan Iran. Komisi ini berhasil mendorong Bank untuk membuka cabang dan

memperluas layanan keuangan dan cakupan asuransi bagi perusahaan yang ada di Arab Saudi dan Iran. Pada bulan Mei 2003, sebuah MoU tentang promosi dan proteksi investasi ditandatangani oleh *the Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry (CSCCI)* dan *the Iran Free Trade Zone (FTZ)* di Pulau Kish daerah selatan Iran. Pada tahun yang sama dapat dilihat salah satu hasil dari perjanjian ini, yaitu ketika 70,000 turis dari Arab Saudi mengunjungi Iran (Altoraiifi 2012, 227).

Hubungan ekonomi Arab Saudi dan Iran terjalin lebih erat. Dibuktikan dengan pertemuan ke enam dari *Joint Economic Commission* yang diselenggarakan di Tehran pada tanggal 13 Maret 2004. Pertemuan ini dihadiri oleh *The Saudi Minister of Commerce and Industry* Dr. Hashim Yamani dan *The Iranian Trade Minister* Mohammed Shariat Madari. Pertemuan ini membahas tentang usaha memperluas jangkauan kerjasama ekonomi hingga ke negara tetangga. Kedua negara membahas kemungkinan kerjasama dalam sektor petrokimia, produksi besi dan baja, pembuatan mobil, farmasi, transportasi darat, laut dan udara, turisme dan pembangunan perusahaan navigasi gabungan (Kuwait News Agency (KUNA) 2004).

Dikutip dari *Tehran Times*, atase ekonomi Iran untuk Arab Saudi menyatakan pada tanggal 1 desember 2004 *The Saudi Arabian General Investment Authority* dan *Iran's National Petrochemical Company* akan



berdiskusi mengenai projek ekonomi gabungan yang akan dilaksanakan oleh kedua negara. Hamid Zadboum juga menyatakan bahwa pertemuan ke tujuh dari *Joint Economic Commission* akan dilaksanakan pada Februari akhir 2005. Pertemuan kali ini akan menandatangani beberapa perjanjian mengenai turisme dan investasi gabungan kedua negara dengan negara lainnya (IRNA 2004). Hamid Zadboum menyatakan :

*Besides, the two sides will discuss air transport and marine shipment of goods, Iran's free trade with the Persian Gulf Cooperation Council members, continuing Iran-Saudi Arabia credit line and eliminating dual taxation will be on the agenda of the meeting*

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa hubungan kerjasama Arab Saudi dan Iran terjalin lebih erat. Kedua negara mulai mendiskusikan tentang perdagangan bebas yang akan dilaksanakan (IRNA 2004).

#### **D. Kerjasama Keamanan Arab Saudi dengan Iran**

Kesuksesan perjanjian kerjasama tahun 1998 membuat kedua negara mempertimbangkan untuk memperluas kerjasama dalam keamanan regional. Pada bulan Mei 1999 Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan melakukan kunjungan selama lima hari. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Pertahan semenjak revolusi Iran (Cordesman dan Burke 2001).

Dalam pertemuan ini, kedua negara mungkin mempertimbangan pembahasan rencana keamanan regional. Namun kedua negara tidak sepakat untuk melakukan pertukaran penempatan atase militer. Dikutip

dari *Associated Press* pada tanggal 2 Mei 1999, Pangeran Sultan menyatakan : “*Military cooperation is not easy between two countries who did not have ties for years*”. Pejabat Arab Saudi lainnya memberi penjelasan bahwa pakta itu lebih mengenai kesepakatan tentang langkah-langkah keamanan internal dan menghormati kedaulatan negara dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (Cordesman dan Burke 2001).

Usaha untuk menjalin kerjasama keamanan terus dilakukan oleh kedua negara dengan melakukan negosiasi membahas keamanan kedua negara. Secara general, negosiasi yang akan dilakukan dapat dibagi menjadi bidang keamanan dalam negeri dan pertahanan regional daerah teluk (Altoraihi 2012, 209-212). Setelah melakukan negosiasi pada tanggal 18 April 2001 di Tehran, Arab Saudi dan Iran menandatangani *The Security Accord of 2001* yang dapat dikatakan sebagai titik normalisasi tertinggi dari hubungan kedua negara. (Amiri dan Ku Samsu 2011). Perjanjian keamanan ini merupakan perjanjian keamanan pertama di antara kedua negara sejak perselisihan yang terjadi selama dua dekade pada pertengahan 1980an. Kedua negara setuju untuk bekerjasama dalam langkah-langkah internal dan saling tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara (A. H. Cordesman 2003).

Perjanjian ini meliputi bidang pertukaran ekonomi, keamanan, sains, budaya, serta olah raga. Terdapat 11 poin dalam perjanjian ini

yaitu: 1) Pembentukan forum keamanan untuk dialog strategis antara Iran dan Arab Saudi bertujuan untuk memantau bahaya umum yang mengancam keamanan kedua negara dan pembentukan mekanisme bersama untuk melawan bahaya ini, 2) Kerjasama dalam memberantas kejahatan terorganisir dan pemalsuan dokumen resmi, terorisme internasional, pencucian uang dan lainnya, penyelundupan senjata, penyelundupan artefak kuno, 3) Kerjasama lintas batas dan penyelamatan maritim, 4) Kerjasama melawan perdagangan narkoba, 5) Kerjasama pelatihan pasukan keamanan, pertukaran pengalaman, dan informasi keamanan, 6) Pencegahan imigrasi ilegal, dan memperkuat kontrol perbatasan, 7) Pembatalan keputusan Saudi melarang Iran dari haji dan mengurangi proses visa mereka, yang memungkinkan orang *Gulf Cooperation Council* untuk mengunjungi Iran tanpa visa selama tinggal adalah tidak lebih dari tiga bulan, 8) Peningkatan perdagangan dan manufaktur antara kedua negara dengan mendorong pertukaran kunjungan profesional dalam bidang ekonomi dan perdagangan 9) Pencegahan semua aspek yang mungkin merusak hubungan ekonomi antara Iran dan Arab Saudi, 10) Kerjasama di bidang budaya dan olahraga pemuda, oleh program pertukaran, dan 11) Pembentukan komite menteri yang akan bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan hubungan dua negara (Altoraiifi 2012, 213-219).

*The Security Accord* merupakan hasil dari pemahaman bersama dari kedua negara. Pakta ini memperlihatkan keinginan kedua negara

untuk menjalin kerjasama dalam pertahanan dan keamanan dengan prinsip tidak saling mengintervensi keadaan dalam negeri negara lain serta menghormati kedaulatan negara, integritas wilayah dan hukum internasional. Pakta ini juga menunjukkan keinginan Arab Saudi dan Iran dalam menjaga keamanan regional wilayah teluk. Dengan disetujuinya pakta ini, dapat kita lihat bahwa hubungan kedua negara berada dalam posisi saling mempercayai sehingga mereka bisa mendiskusikan permasalahan keamanan negara mereka. Pakta ini merupakan bukti historis dalam hubungan baik yang terjalin antara Arab Saudi dan Iran (Altorafi 2012, 213-219).

Kerjasama kedua negara juga terlihat ketika terjadinya peristiwa 11 September. Peristiwa ini membuat koordinasi kedua negara meningkat untuk menghadapi al-Qaeda. Kerjasama ini berlanjut saat Amerika Serikat menginvasi Irak. Arab Saudi dan Iran mendeklarasikan diri untuk bergabung mendukung Amerika Serikat dalam menginvasi Irak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan *spillover effect* dari perpecahan kepemimpinan Saddam (Wehrey, et al. 2009, 21).

Pada bulan September tahun 2002 Presiden Khatami melaksanakan Umrah dan bertemu dengan Pangeran Abdullah di Jeddah. Presiden Khatami disambut oleh Pangeran Nayef Bin Abdul Aziz Al Saud di bandara Jeddah. Pertemuan ini membahas nuklir Irak dan Iran. Iran merasa dikucilkan oleh pihak internasional karena program nuklir yang

dimilikinya (Keynoush 2016, 158). Tetapi Arab Saudi mendukung Iran untuk mengembangkan program nuklirnya (Rizwan, et al. 2014).

Pangeran Saud al-Faisal selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam konferensi pers pada 6 April 2006 menyatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan mengunjungi Iran. Kemudian ia juga memberikan pernyataan tentang posisi Arab Saudi memandang program nuklir Iran. Ia menyatakan :

*Well, the question assumes that there are weapons which Iran denies the vehemently. They don't only deny not having the weapons, but they deny the intention of having the weapons. We take these denials at their face value. And therefore we see no threat in Iran's acquiring the knowledge of atomic energy science if this does not lead to proliferation. We do believe the proliferation is a threat. We do believe that the best policy as regards the argument that the Middle East already has weapons of mass destruction (WMDs) is not to expand the states who own those WMDs, but to prevent and end the acquisition of these weapons in the country that has the motive of Israel (inaudible). That is the better policy. It is not the first time they [Iranians] have [maritime] maneuvers. We don't believe that they are a threat in and off themselves. (Minister of Foreign Affairs 2010)*

Dalam pernyataan ini dapat dilihat hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi mempercayai pernyataan Iran bahwa tidak memiliki rencana untuk membuat senjata atom. Arab Saudi mempercayai bahwa Iran bukanlah ancaman bagi keamanan negaranya serta keamanan regional negara teluk.

Pada bulan Maret 2007, Presiden Ahmadinejad melakukan kunjungan resmi pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi. Raja Abdullah sendiri langsung menjemput Presiden Ahmadinejad di bandara.

Kunjungan ini diharapkan dapat menekan konflik sektarian yang terjadi di timur tengah. Seperti yang dikatakan Menteri Luar negi Arab Saudi : *"The two parties have agreed to stop any attempt aimed at spreading sectarian strife in the region."* Kemudian pertemuan ini juga membahas tentang peningkatan kekerasan yang terjadi di Irak, program nuklir Iran, serta konflik Arab-Israel (Keynoush 2016).

*Interfaith Dialog Confrence* yang diselenggarakan pada bulan Juli 2008 di Riyadh dimanfaatkan oleh kedua negara untuk membicarakan hubungan bilateral mereka. Ayatollah Hashemi Rafsanjani, *head of the Iranian Assembly of Experts and chairman of Iran's Expediency Council*, mewakili Iran dalam Konfrensi ini. Sebenarnya, tujuan Rafsanjani mengunjungi Arab Saudi untuk menemui ulama syiah di Arab Saudi sebagai ulama senior syiah. Tetapi karena hubungan baiknya dengan Raja Abdullah , mereka membicarakan hubungan bilateral kedua negara serta permasalahan peserta haji Iran yang ada di Mekah dan Madinah (Iranian Diplomacy 2010 ).

Pada pertemuan ini, Rafsanjani dan Raja abdullah menekankan pentingnya peran Arab Saudi dan Iran dalam menjaga perdamaian di wilayah Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran dapat bekerja sama dalam memerangi ekstrimis dang memperkuat kerjasama antara kedua negara. Raja Abdullah juga menyatakan bahwa ia akan memberi peringatan kepada Amerika Serikat mengenai tindakan non-diplomatik yang

digunakan Amerika Serikat terhadap Iran (Karami 2014 ). Tindakan serupa juga telah dilakukan Raja Abdullah pada saat pertemuannya dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Chaney pada bulan Maret 2008. Raja Abdullah menyatakan bahwa tindakan negosiasi merupakan cara terbaik untuk meredakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran (Wehrey, et al. 2009, 99).

Pentingnya kunjungan Rafsanjani ke Arab Saudi dapat dilihat dari besarnya peran Arab Saudi di Timur Tengah. Arab Saudi memiliki peran kunci dalam permasalahan di Palestina dan Lebanon. Karena faktor ini, Iran harusnya mempertahankan hubungannya dengan Arab Saudi dan memanfaatkan hubungan ini untuk meredakan konflik sektarian dan ketegangan politik. Kerjasama yang terjalin antara Arab Saudi dan Iran akan memfasilitasi pencarian solusi pada permasalahan di Palestina, Lebanon, Irak dan Afganistan (Iranian Diplomacy 2010 ).

Pentingnya kerjasama diantara kedua negara juga diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Manoucher Mottaki pada Tanggal 19 Januari 2010. Ia menyatakan : *“Iran and Saudi Arabia, along with other Islamic nations, can take important steps towards resolving problems facing the Islamic world”*. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa Mottaki berpendapat bahwa Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara penting di wilayah Timur Tengah. Kerjasama kedua negara dapat memberikan

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi negara-negara lain di timur tengah ( Tehran Times 2010).

Hubungan Arab Saudi dan Iran berlanjut pada pertemuan Manoucher Mottaki dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Iran Mohammad bin Abbas bin Hamza al-Kalabi pada tanggal 23 Mei 2010. Pada pertemuan ini, Mottaki menyatakan bahwa Iran menunggu kerjasama yang lebih dengan Arab Saudi. Mottaki menjelaskan perlunya kerjasama di berbagai bidang dengan Arab Saudi agar mendorong terjalannya kerjasama yang lebih di wilayah Timur Tengah. Pada pertemuan ini, Mottaki juga menekankan kembali peran penting Arab Saudi dan Iran dalam tercapainya perdamaian di wilayah Timur Tengah (ZAWYA 2010).

Penjelasan pada BAB II ini, memberikan gambaran mengenai hubungan baik yang terjalin antara Arab Saudi dan Iran dalam bidang diplomatik, ekonomi dan keamanan . Walaupun Arab Saudi dan Iran memiliki banyak perbedaan dalam berbagai masalah, namun tidak pernah mendorong pada situasi konflik antar negara, bahkan pemutusan hubungan diplomatik. Hubungan baik kedua negara dalam bab ini, didukung dengan kepemimpinan yang kooperatif. Sehingga, menjaga stabilitas hubungan kedua negara pada era ini. Dan memang, tujuan pemerintah pada masa ini bertujuan untuk menstabilkan hubungan kedua negara yang sebelumnya memanas. Pemaparan mengenai hal ini penting untuk melihat perubahan hubungan diplomatik kedua negara dari tahun ke tahun. Terkhusus lagi untuk melihat perubahan hubungan kedua negara dari yang



semulanya berhubungan baik kemudian berada pada kondisi konflik, yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 2016.